

PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SAWANGAN KECAMATAN AIRMADIDI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Oleh : Arlyn A. Karamoy

ABSTRAK

Peranan generasi muda dalam pembangunan sangat penting artinya, bukan saja karena pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar tetapi yang paling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, maka pembangunan akan dapat kehilangan arah. Berdasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan kepada pemerintah daerah yakni gubernur/bupati/walikota wajib melaksanakan pelayanan kepemudaan yang tujuannya diarahkan untuk pembangunan (pasal 7).

Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan peran pemerintah serta semua lapisan masyarakat terutama generasi muda yang perlu dipersiapkan sebaik-baiknya untuk menerima tongkat estafet agar dapat melanjutkan perjuangan bangsa dan mampu menghadapi tantangan dan menjawab tantangan dimasa yang akan datang. Sebagai generasi penerus, pemuda terutama pelajar dan mahasiswa harus tangguh menghadapi tantangan yang akan datang demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa dan negara dalam satu gerak langkah yang terarah, terpadu dan berkesinambungan maka generasi muda perlu dipersiapkan secara matang dan usaha persiapan itu melalui program pembinaan generasi muda. Pembangunan membutuhkan generasi muda yang potensial, produktif, kreatif, serta mempunyai inspiratif yang konstruktif.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Generasi Muda dan Pembangunan

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan politik walaupun untuk mewujudkannya sering diperhadapkan dengan berbagai kendala, atau dalam beberapa sistem politik tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan baik. Seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan dan keinginan manusia dalam rangka mempertahankan eksistensinya, negara juga memandang perlu mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap kebutuhan dan keinginan para warga negara tersebut demi eksistensi negara itu sendiri. Konsekuensinya, seringkali kita melihat terjadinya benturan-benturan di antara keduanya, yaitu antara kebutuhan dan keinginan masyarakat atau infra struktur dengan kebutuhan atau kemauan politik pemerintahannya atausupra struktur.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa tiap-tiap negara dengan tidak melihat sistem politik yang dianutnya, mempunyai ruang dan pandangan tersendiri terhadap kemungkinan-kemungkinan partisipasi politik setiap warga negara. Partisipasi itu dapat secara spontan, secara berkesinambungan, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan kebutuhan para anggota masyarakat seringkali harus bertabrakan dengan kepentingan dan kebijakan pemerintah. Benturan ini boleh jadi mencakup segala kepentingan anggota-anggota masyarakat, termasuk pula keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik, dengan suatu ketegasan bahwa kebutuhan para anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik yang dimilikinya harus disingkirkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan peran pemerintah serta semua lapisan masyarakat terutama generasi muda yang perlu dipersiapkan sebaik-baiknya untuk menerima tongkat estafet agar dapat melanjutkan perjuangan bangsa dan mampu menghadapi tantangan dan menjawab tantangan dimasa yang akan datang. Sebagai generasi penerus, pemuda terutama pelajar dan mahasiswa harus tangguh menghadapi tantangan yang akan datang demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa dan negara dalam satu gerak langkah yang terarah, terpadu dan

berkesinambungan maka generasi muda perlu dipersiapkan secara matang dan usaha persiapan itu melalui program pembinaan generasi muda. Pembangunan membutuhkan generasi muda yang potensial, produktif, kreatif, serta mempunyai inspiratif yang konstruktif.

Peranan generasi muda dalam pembangunan sangat penting artinya, bukan saja karena pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar tetapi yang paling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, maka pembangunan akan dapat kehilangan arah. Berdasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan kepada pemerintah daerah yakni gubernur/bupati/walikota wajib melaksanakan pelayanan kepemudaan yang tujuannya diarahkan untuk pembangunan (pasal 7).

Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan..

Partisipasi generasi muda dalam pembangunan harus sejalan dengan cita-cita nasional, dalam lingkungan ini diharapkan generasi muda untuk mengambil bagian secara efektif memelopori usaha-usaha masyarakat pancasila dikalangan generasi muda itu sendiri. Pada prinsipnya peranan generasi muda merupakan rangkaian usaha meningkatkan dan menetapkan kesadaran kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 6 mengamanatkan peningkatan kapasitas masyarakat yang termasuk dalamnya kelompok pemuda. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis berkeinginan untuk membahas secara ilmiah mengenai kehadiran generasi muda sekarang ini.

Batten (dalam Ndraha 1990:110) menyatakan bahwa pembangunan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan mereka, merencanakan usaha pemenuhannya, dan melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya. Proses ini dapat diringkas dengan nama partisipasi. Maka dalam setiap program yang bertujuan menciptakan kehidupan yang layak bagi masyarakat harus melibatkan masyarakat itu sendiri dalam setiap tahapan dan proses dalam kegiatan tersebut. Karena peran masyarakat sangat penting dimana masyarakat yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut.

Terdapat beberapa alasan mengapa anggota masyarakat perlu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yaitu:

- mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat.
- Mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat.
- Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang di hadapi masyarakat.
- Mereka mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan yang terdiri dari SDA, SDM, Dana dan Teknologi yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakat.
- Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan sumber daya manusianya sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar. (dalam Adisasmita 2006, 37-37)

Berdasarkan pengamatan penulis melihat kondisi yang ada di Desa Sawangan pemerintah desa jarang melibatkan pihak generasi muda dalam proses perencanaan hingga proses serta pelaksanaan pembangunan di desa Sawangan padahal telah dijelaskan diatas peran generasi muda sangatlah penting bagi pembangunan yang ada di desa. Hal ini di indikasikan oleh beberapa faktor yakni pembangunan sarana prasarana desa seperti kantor desa, jalan desa, serta jembatan penyebrangan. Mengingat bahwa begitu penting peran

generasi muda dalam pembangunan, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang telah dipaparkan di atas yakni dalam lingkup pembahasan ***Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara***)

b. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan di desa Sawangan Kecamatan Airmadidi dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan pembangunan.

c. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan pengembangan paradigma baru bagi dunia ilmu pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pemerintahan pada khususnya. Serta peranan generasi muda dalam pembangunan desa pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif kepada Pemerintah Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi.
- Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak atau khalayak umum baik sebagai pelaku dan pelaksana pemerintahan, khususnya di Papua dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Konsep Partisipasi Politik

Pada abad 14 hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan orang terpandang (Mas'ood, 2001:45). Kecenderungan kearah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa renaissance dan reformasi abad ke 15 sampai abad 17 dan abad 18 dan 19. Tetapi cara-cara bagaimana berbagai golongan masyarakat (pedagang, tukang, orang-orang profesional, buruh kota, wiraswasta industri, petani desa dan sebagainya), menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda di berbagai negara.

Menurut Myron Weiner seperti dikutip oleh Mas'ood, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik.

1. Modernisasi

Ketika penduduk kota baru (yaitu buruh dan pedagang, kaum profesional) melakukan komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa, mereka merasa dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

2. Pengaruh-pengaruh struktur kelas sosial

Begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

Kaum intelektual (sarjana, filosof, pengarang, wartawan) sering mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru.

4. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik

Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakangerakan yang menuntut agar "hak-hak" ini dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan

Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup pada kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Maka dari itu, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Istilah partisipasi seringkali digunakan untuk memberi kesan mengambil bagian dalam sebuah aktivitas. Mengambil bagian dalam sebuah aktivitas dapat mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut.

Syarat utama warga negara yang disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Michael Rush dan Philip Altof (dalam Kartini Kartono, 1983:22) mengemukakan bahwa partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Merriam Budiardjo (1982:1) memberikan pengertian tentang partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Publik Policy), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Istilah partisipasi politik telah dipergunakan dalam berbagai arti. Apakah partisipasi politik itu hanya perilaku atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi- persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi (umpamanya informasi politik, persepsi seorang tentang toleransi, bagi urusannya sendiri suatu keyakinan bahwa orang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan- tindakan pemerintah).

Jika partisipasi itu perilaku, apakah ia mencakup segala kegiatan yang mempunyai relevansi politik, tetapi didalam essei ini didefinisikan partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan pada terwujudnya kebijakan itu. (Maurice Duverger, 1981:19).

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan, pelayanan pemerintah. Sehingga partisipasi itu memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan, dimana pembangunan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat.

Bhattacharyya (dalam Ndraha,1990: 102) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama, sedangkan Mubyarto (dalam Ndraha,1990: 102) juga menyebutkan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Wahyudi Kumorotomo (1999:112-114) mengatakan bahwa partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warganya.

Secara umum corak partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam: 1. Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation) 2. Partisipasi kelompok(group participation) 3. Kontak antara warga Negara dengan pemerintah (citizen

government contacting) 4. Partisipasi warga negara langsung Begitu juga halnya dengan Soetrisno (dalam Tangkilisan, 2005:320) partisipasi ditempatkan sebagai *style of development* yang berarti bahwa partisipasi dalam kaitannya dengan proses pembangunan haruslah diartikan sebagai usaha mentransformasikan sistem pembangunan dan bukan sebagai suatu bagian dari usaha *system maintenance*. Untuk itu, partisipasi seharusnya diartikan sebagai suatu nilai kerja bagi masyarakat maupun pengelola pembangunan sehingga partisipasi berfungsi sebagai mesin pendorong pembangunan. Dalam pembangunan, partisipasi semua unsur masyarakat dengan kerja sama sukarela merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan. Soehardjo (dalam Tangkilisan 2005:321). Dalam hal ini partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri (*self-reliance*) dalam usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Istilah partisipasi seringkali digunakan untuk memberi kesan mengambil bagian dalam sebuah aktivitas. Mengambil bagian dalam sebuah aktivitas dapat mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut.

Syarat utama warga negara yang disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Beberapa ahli berpendapat yaitu Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson (1984:5) bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan warga preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Michael Rush & Philip Althoff (2003: 23) Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Herbert Mc Closky (dalam Miriam, 1994: 183-184) Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.

Miriam Budiarto (1994: 183) Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publicpolicy*.)

Ramlan Surbakti (1992: 140-1410) Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

b. Konsep Generasi Muda

Generasi muda secara umum dapat dipandang sebagai suatu fase siklus pembentukan kepribadian manusia, sebagaimana juga dalam fase-fase lainnya, maka generasi muda ini mempunyai ciri sendiri yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. (Simanjuntak, B, Pasaribu IL, 1980 : I 03).

Menurut N. Daljone (1976 : 76) bahwa generasi muda sebagai suatu gejala universal yang dapat dibedakan atas gejala-gejala biologis dengan keanekaragaman struktur dan dapat dirumuskan kedalam gejala cultural, generasi muda diartikan sebagai putra-putri yang berumur 12 - 15 tahun sesuai dengan penetapan "Inter regional seminar the training of profesional voluntary youth leader". Apabila konteks kepemudaan itu dilihat dari segi pembinaan dan pengembangan.

c. Konsep Pembangunan

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang,

mulai dari perspektif sosiologi klasik, pandangan marxis, modernisasi dan lain-lain. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Meskipun pengertian pembangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli sangat bervariasi, tetapi pada dasarnya masih ada titik temu atau kesepakatan yang terdapat dalam pengertian tersebut, antara lain sebagai berikut :

Sujadmoko (1971: 3) memberikan pengertian bahwa pembangunan merupakan usaha penyesuaian dari diri suatu sosial secara keseluruhan pada aneka ragam masalah dan tantangan-tantangan baru dan proses demikian akan merupakan wujud sosial atau transformasi sosial.

Pengertian pembangunan pada umumnya adalah usaha perubahan yang dilakukan secara sadar, berencana dan berkesinambungan menuju kearah yang lebih baik berdasarkan pada norma-norma tertentu yang direncanakan dengan memberdayakan potensi alam, manusia dan sosial budaya (Beratha, 1982: 32).

Siagian (1984: 29), menyatakan bahwa pembangunan adalah rangkaian yang secara sadar dilakukan, artinya, keadaan yang lebih baik yang didambakan oleh suatu masyarakat serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung tidak terjadi dengan sendirinya apalagi secara kebetulan.

Dikatakan pula oleh Siagian bahwa pembangunan itu dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan adalah suatu usaha secara sadar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi jaman baru yang lebih baik, juga usaha yang terus menerus dilaksanakan untuk membuat yang lebih baik menjadi lebih baik lagi.

Sudah diketahui bahwa pembangunan pada dasarnya adalah suatu perubahan. Dalam konsep sosiologis, perubahan ini dapat berarti kemajuan dan dapat bila berarti kemundian (Progress dan Regress).

Dari beberapa pengertian atau definisi diatas tentang pembangunan dapat disimpulkan bahwa pembangunan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Usaha atau proses
2. Peningkatan, kemajuan atau perubahan kearah kemajuan
3. Berkesinambungan
4. Dilakukan secara sadar atau dengan sengaja
5. Perencana
6. Untuk tujuan pembinaan (pembangunan) bangsa

METODELOGI PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari analisis yang digunakan maka penelitian ini termasuk pada jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yang menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat mengenai Fakta-Fakta dan Sifat-Sifat Di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara (Sugiono, 2008:33).

b. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian mencakup partisipasi politik generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda.

c. Informan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai permasalahan penelitian yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci (key informan) dan informan biasa. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan

dengan permasalahan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah pengainbilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi, 1987:157).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah:

- 1 orang Kepala Desa
- 3 pegawai kantor desa
- 2 Tokoh Pemuda
- 1 Tokoh Agama
- 8 Orang Masyarakat Desa Sawangan

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *Setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumbernya datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *naturalsetting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2007:62-63).

1. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data digunakan dalam teknik Analisa Data yang bersifat Deskriptif analisis. Menurut Sumardi Suryabrata (1999:18) peneliti deskriptif adalah membuat penandaan (deskriptif) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau Daerah tertentu.

menurut Mardalis (1999:26) penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau yang ada. Dengan kata lain, untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara Variable-variable yang ada.

Tujuan Penelitian Deskriptif adalah untuk membuat pencurahan secara Sistematis, Faktual, dan Akurat mengenai Fakta-Fakta dan Sifat-Sifat Populasi atau Daerah tertentu (Suryabrata, 2010:75).

PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam Pembangunan

Suatu bentuk partisipasi yang agak mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku masyarakat dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan prosentase orang yang memilih dibandingkan dengan jumlah warga negara yang berhak memilih. Ternyata juga bahwa pendapatan, pendidikan dan status merupakan faktor penting dalam proses partisipasi atau dengan perkataan lain orang yang berpendapatan tinggi, yang berpendidikan baik, yang berstatus sosial tinggi, cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi dari pada orang yang berpendapatan serta berpendidikan rendah.

Akan tetapi, memberikan suara dalam pemilihan tidak merupakan satu-satunya bentuk partisipasi, lagi pula pemilihan umum hanya memberikan gambaran yang sangat kasar mengenai partisipasi. Masih terdapat berbagai bentuk partisipasi lain yang berjalan secara kontinue dan tidak terbatas pada masa pemilihan umum saja. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa presentase partisipasi dalam pemilihan umum sering kali berbeda

dengan prosentase partisipasi dalam kegiatan yang tidak menyangkut pemberian suara semata-mata. Maka dari itu, untuk mengukur tingkat partisipasi perlu diteliti berbagai kegiatan politik.

Berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung kepada partisipasi politik masyarakat khususnya dalam penelitian ini adalah generasi muda dan bahwa pengikut sertaannya akan membantu penanganannya masalah- masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, agama dan sebagainya.

Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara dengan saudara Jackson M seorang mahasiswa dari Sawangan mengenai keikutsertaan Generasi Muda Dalam Partai Politik.

"Keikutsertaan masyarakat dalam partai politik tidak efektif ini terbukti dengan tidak ada keseriusan masyarakat di desa kami berpartisipasi dalam partai politik itu dikarenakan partisipasi warga hanya bersifat musiman dan lebih cenderung ikut-ikutan".

Selanjutnya guna menambah data dalam penelitian ini maka penulis mewawancarai seorang Tokoh Pemuda yang bernama Saudara Sandy S Mengenai partisipasi generasi muda di desa Sawangan dalam bentuk pemikiran.

"Partisipasi generasi muda dalam bentuk pemikiran akhir-akhir ini bisa dibilang tidak berjalan dengan lancar itu disebabkan, kebanyakan hanya masyarakat yang tua-tua dan pemuda banyak yang tidak hadir bila desa atau dari kecamatan sedang mengadakan musyawarah. Alasannya mungkin kami belum dianggap mampu memberikan kontribusi juga percuma ikut musyawarah kalau akhirnya bukan keputusan masyarakat yang ditindak lanjuti melainkan keputusan pemerintah jadi apa yang diharapkan masyarakat dihiraukan. contohnya masyarakat meminta adanya pembangunan jalan desa, dan jembatan penyebrangan.

Belum ada definisi partisipasi politik yang memusatkan dan mencakup seluruh ruang lingkup yang berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan. Adalah kurangtepat untuk memulai dari beberapa batasan pemikiran apriori yang dapat mewakili intisari dari partisipasi politik, akhirnya mereka tiba pada suatu kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan partisipasi politik dalam pembangunan yang disebut sebagai *"defelopment participation"*, sebagai berikut: 1. Keterlibatan rakyat di dalam proses pembuatan keputusan.

2. Keterlibatan dalam implementasi dari program-program.

3. Keterlibatan dalam benefits dan evaluasi dari setiap program.

Sesuai Undang-undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dimana generasi muda diberdayakan terutama dalam bidang pembangunan dan perlu diberi pengetahuan politik dalam hal ini adalah pemberian pendidikan politik. suatu kenyataan setiap generasi muda selalu mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri yang dibawa oleh pengaruh lingkungan dan keadaan sosial, ekonomi dan politik pada saat tertentu.

Oleh karena itu generasi muda harus diberikan pembekalan selain berupa bimbingan dan pengarahan sesuai prinsip kebersamaan juga pembekalan ideologis, yang harus dimulai sejak kecil baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal, juga melalui kursus-kursus dan lokakarya. Dengan rangkaian usaha ini pada hakekatnya adalah dalam rangka proses peralihan dari pelestarian nilai-nilai Pancasila.

Namun yang penting dalam pembekalan ini adalah adanya kesadaran, kemauan dan tekad dari generasi muda untuk berani maju dan tampil ke depan, dalam melaksanakan tanggung jawab nasional yang lebih besar berdasarkan identitas dan kepercayaan kepada kekuatan sendiri.

Dengan demikian, pendidikan politik terhadap pemuda pada dasarnya untuk menciptakan suatu keberadaan bangsa yang beradab, dimana dalam pergaulan hidup antar sesama generasi muda sebagai anggota masyarakat terdapat rasa kasih sayang, hormat menghormati, bantu membantu atau tolong menolong, mengetahui akan hak dan tanggung jawab masing-masing, menjunjung tinggi hukum, agama, luhur budinya. Ini karena di dukung oleh moral yang luhur dan baik, yaitu Moral Pancasila, dimana tingkah laku lahiriah di dalam masyarakat.

Bahwa pendidikan politik, mengandung makna mempertajam nalar seseorang dengan bekal pedoman-pedoman kehidupan sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang hidupnya tak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan dunia internasional.

Sasaran luhur yang lain dari pendidikan politik, yakni kesadaran moral yang tumbuh sejak revolusi kemerdekaan yaitu semangat dan nilai-nilai perjuangan hidup bangsa sebagai Pancasila yang menjiwai seluruh masyarakat kita, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur di kawasan nusantara yang damai sejahtera dalam pergaulan bangsa-bangsa yang bersahabat di muka bumi ini.

Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sawangan mengenai pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik.

"Pendidikan politik itu sangat berpengaruh sekali terhadap partisipasi politik itu dikarenakan apabila pemuda mendapat pendidikan politik otomatis generasi muda lebih mengerti dan paham bagaimana berpolitik yang baik.

Hal diatas juga didukung oleh Ibu Sekretaris Desa Sawangan yang mengatakan :

"Pemberian Pendidikan Politik terhadap masyarakat termasuk didalamnya generasi muda sangat-sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan juga pembangunan wilayah pedesaan, kalau masyarakat mengerti bagaimana berpolitik yang benar, maka akan tercipta suatu iklim politik dan pembangunan yang baik di desa sawangan.

Dengan demikian, pendidikan politik dapat menumbuhkan semangat di dalam Masyarakat, dengan berbagai cara antara lain: ceramah tentang contoh teladan dari para Tokoh-tokoh masyarakat, serta beberapa cara lain seperti:

1. Bahan-bahan bacaan dari surat kabar, majalah dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan bisa membentuk pendapat umum.
2. Siaran-siaran radio maupun televisi.
3. Organisasi-organisasi Kepemudaan yang ada dalam masyarakat itu, apakah itu merupakan organisasi yang bersifat sosial, agama maupun bersifat politik.

Dari kegiatan memang sangat diharapkan pendidikan politik benar-benar dilaksanakan agar benar-benar masyarakat khususnya generasi muda lebih aktif. Berbicara tentang pendidikan politik yang paling dominan adalah ideologi Pancasila yang diartikan sebagai cita-cita atau keinginan suatu bangsa untuk memperoleh kemajuan dan perbaikan disegala bidang demi mencapai kesejahteraan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. Ideologi Pancasila secara jelas merupakan pengejawantahan semangat kebangsaan, cara dan pedoman mencapai cita-cita, dasar-dasar dan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pedoman hidup dari bangsa yang bersangkutan yang harus dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari (M. Djadiono, 1985:75).

Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda

Berdasarkan kenyataan yang ada dari keadaan generasi muda sekarang terdapat kecenderungan yang kurang menggembirakan yang menyebabkan masyarakat menjadi pesimis akan masa depan mereka, mempersoalkan hal ini secara berlebih-lebihan bukanlah merupakan tindakan yang tepat.

Dalam masa pembangunan yang lebih penting adalah mempersiapkan generasi muda dalam setiap waktu agar mereka kelak dalam proses perkembangan dapat memenuhi tuntutannya.

Dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda dapat dikelompokkan dalam 5 pengelompokan, yaitu :

1. Jalur keluarga

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan adalah orang tua serta anggota keluarga terdekat yang merupakan lingkungan pertama dalam rangka pelaksanaan konsepsi pendidikan seumur hidup.

Menegakan disiplin kepada generasi muda adalah sangat penting sekali karena tanpa dibekali dengan disiplin kepada generasi muda maka mereka dapat kehilangan arah. Di Desa Sawangan tentang pembinaan dan pengembangan generasi melalui jalur keluarga masih sangat penting karena banyak generasi muda yang ada masih mempunyai orang tua yang lengkap dalam arti masih terdapat ayah dan ibu. Dengan adanya keluarga yang lengkap tentunya akan dapat mempengaruhi tingkat perkembangan pemuda baik dilihat dari segi social, biologis dan rohani. Namun banyak pula generasi yang kehilangan arah oleh karena jalur keluarga tak mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi olehnya sehingga ia juga mengalami frustrasi.

Dari sinilah pertumbuhan ideologi generasi muda telah menempatkan perhatian yang memerlukan pembinaan, namun untuk mencegah adanya kemerosotan moral tersebut yang menentukan dari lingkungan keluarga.

Pemikiran generasi muda dapat terarah tentu memerlukan perhatian yang serius dari keluarga (orang tua) karena tidak sedikit generasi muda yang sekarang ini telah kehilangan arah karena disebabkan oleh kesalahan orang tua untuk membimbingnya sehingga generasi muda semakin terlempar atau berpikir masa bodoh.

2. Jalur Organisasi Kepemudaan

Organisasi pemuda dibagi dalam tiga jalur:

- Jalur SLTP dan SMU yaitu OSIS
- Jalur perguruan tinggi akademi (kampus) adalah senat mahasiswa dan denah pada tingkat fakultas dan BEM pada tingkat universitas.
- Jalur kepemudaan dimana terdapat KNPI sebagai komunikator antar generasi muda generasi ekstra universitas dan organisasi lainnya.

3. Jalur Masyarakat

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan melalui ;

- Yang melembaga antara lain lembaga peribadatan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga pers dan lembaga diskusi lainnya.
- Yang tidak melembaga, antara lain pergaulan sehari-hari, tempat rekreasi/wisata, pelayanan umum dan sebagainya. Khusus mengenai lembaga peribadatan maka di Desa Sawangan oleh karena mayoritas penduduk adalah agama Kristen maka kegiatan-kegiatan kepemudaan dilaksanakan melalui jalur evangelisasi dan kegiatan lainnya. Dengan jalur tersebut diatas maka telah banyak generasi muda mulia menyadari sehingga dengan kegiatan tersebut dapat mempertebal iman mereka. Memang generasi muda harus perlu diberikan dasar-dasar keagamaan yang lebih matang agar semua kegiatan yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik.

Biasanya keluarga yang jauh dari agama, tidaklah mungkin memberikan pembinaan jiwa agama bagi para generasi mudanya. Dalam pembinaan agama sebenarnya faktor orang tua sangat menentukan karena dengan agama akan terjalin kedalaman pribadi generasi muda bersamaan dengan unsur-unsur pribadinya yang didapatkan melalui pengalamannya sejak kecil. Dan apabila agama itu hanya didapatkan melalui pelajaran yang dangkal saja, maka agama itu dikenalkan dan kurang meresap kedalam jiwanya.

Menurut Seorang Tokoh Agama di Desa Sawangan Ibu.Ivon. Mengatakan : *Proses pembinaan generasi muda melalui jalur agama tergolong efektif, meskipun masih ada beberapa pemuda yang tidak mengindahkan agama, namun selama ini menurut pengalaman saya pemuda di Desa Sawangan masih mengindahkan agama, mendengar apa yang dikatakan pendeta-pendeta, guru-guru agama dan tokoh masyarakat lainnya.* Hal ini senada dengan Sdr. Jendri Tokoh pemuda di Desa Sawangan beliau mengatakatan : *pemuda di Desa Sawangan sepengetahuan saya dengar-dengaran namun tidak dipungkiri masih saja ada beberapa kelompok yang tidak mendengarkan perkataan orang tua. Namun pembinaan melalui gereja, kegiatan kepemudaan masih efektif.*

Gambaran diatas tentang pembinaan dalam bidang keagamaan dari keluarga terhadap generasi muda di Desa Sawangan menurut Bapak Johnny yang mempunyai anak yang masih muda mengatakan sering dilaksanakan ketika kita berada didalam rumah dan karena orang tua yang sibuk bekerja dan kita tidak berada dirumah tapi di gereja sangat sering.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari data tersebut diatas tentang pembinaan dalam bidang keagamaan dari keluarga terhadap generasi muda di Desa Sawangan ternyata sudah dilaksanakan dengan baik walaupun perlahan tetapi menuju kearah yang lebih baik. Sebetulnya pembinaan agama semata-mata harus dimulai di lingkungan keluarga.

4. Jalur Pemerintahan

Generasi muda perlu dibimbing dan mempersiapkan dengan saksama untuk dapat ikut serta dalam pembangunan baik melalui usaha pendidikan maupun berbagai macam

upaya lainnya. Pemerintah Desa Sawangan didalam rangka ini menganggap perlu selalu mengusahakan meningkatkan cara-cara dan metode-metode pemecahan masalah pembangunan. Tampilnya generasi muda dalam kelangsungan hidup merupakan suatu anugrah yang tidak ternilai harganya. Kembangkan dengan sebaik-baiknya, untuk mengantarkan pemuda Indonesia kemasa depan sebagai suatu generasi yang kuat sehat dan bertanggung jawab, Berketuhanan Yang Maha Esa, cinta tanah air, demokrasi dan memiliki ketrampilan kerja serta memiliki pandangan yang nasional yang dipadukan dengan moral pancasila.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan instansi-instansi pemerintah yang langsung membina generasi muda dengan programnya, yaitu ;

- a. Instansi departemen pendidikan nasional
 - Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan dikalangan generasi muda
 - Menumpuk bakat dan ketrampilan/prestasi dibidang olahraga atau kesenian.
- b. Pihak kepolisian
 - Dibentuknya pos-pos kamling pada setiap jaga
 - Membina mental kaum muda dengan mengadakan ceramah atau seminar
 - Memberantas masalah-masalah kriminalitas.
- c. Dinas Pemuda dan Olahraga

Dari dinas pemuda dan olahraga pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pemberdayaan kepemudaan dan kegiatan olahraga, namun telah lama dilaksanakan. Pembinaan terhadap generasi muda seharusnya berlangsung kontinu atau berkelanjutan agar generasi muda semakin sadar akan pentingnya peranan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembangunan yang ada di daerah.

Dari hasil penelitian melalui wawancara terhadap aparat desa yang ada di desa Sawangan membenarkan hal-hal diatas salah satunya pernyataan dari Bapak Adri salah satu perangkat di desa Sawangan. Beliau mengatakan : *Peranan pemerintah kabupaten di Desa Sawangan terhadap pembinaan generasi muda saya rasa masih kurang, karena tidak pernah terlihat lagi kegiatan yang dilaksanakan, padahal untuk membangun Desa Sawangan perlu adanya keterlibatan dari pemuda-pemuda dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab untuk menyadarkan pemuda akan arti penting keberadaan mereka di masa muda mereka.*

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran Masyarakat untuk berpartisipasi politik secara aktif bukan hanya datang dan tumbuh begitu saja, tetapi ada berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah dengan memberikan pendidikan politik serta sosialisai politik kepada masyarakat.
2. Partisipasi politik masyarakat bukan hanya dalam berbentuk pemikiran dan ide-ide, tetapi lebih di tekankan kepada bentuk konkrit untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Kepala Desa sebagai pembuat kebijakan, agar nantinya kebijakan yang dibuat Kepala Desa dapat dirasakan menyentuh sampai kepada lapisan terbawah dari masyarakat.
3. Dalam Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda ada 4 jalur yakni melalui jalur keluarga, jalur organisasi kepemudaan, jalur pemerintah dan jalur organisasi kepemudaan.

b. Saran

1. Mengingat kurangnya partisipasi politik masyarakat yang ada di Desa Sawangan, maka Pemerintah Desa, dalam hal ini Kepala Desa harus dapat melihat secara jeli, untuk meningkatkannya, sehingga nantinya diharapkan dalam jangka waktu kedepan, proses pembuatan kebijakan Kepala Desa dapat lebih efektif dan efisien lagi, sehingga menuju kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Desa Sawangan.

2. Di Desa Sawangan terkesan pemerintah tidak terlalu memperhatikan pendapat, ide-ide pemikiran dari masyarakat, oleh karena itu diharapkan kiranya pemerintah setempat dapat menyerap aspirasi dari masyarakat.
3. Diharapkan Kepada Pemerintah demi meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan perlu dihidupkan lagi keempat jalur dalam rangka pembinaan dan pengembangan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Saifuddin, 2005. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Bryant C dan L. G. White 1999. *Menaging Pevelopment*. Westview press inc colorado.
- Dan Nimo, 2003. *Komunikasi Remaja karya*. Bandung.
- Kansil 2002. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta.
- Kaho.J.R, 2003. *Ilmu Sosial Dasar (Kumpulan Essei)*. Usaha Nasional Surabaya.
- Koentjaraningrat, 2004. *Pengantar Antropologi Sosial*. Aksara Baru Jakarta.
- Margono S. 1996. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Mardalis, 2004. *Mentode Penelitian*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Marbun N.M, 2000. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun Dua Ribu*. Edisi Revisi Penerbit Erlangga Jakarta.
- Mas'oeed, Mohtar dan MacAndrews., 2001. *Perbandingan Sistem Politik*.
- Notoatmodjo Soekidjo, 1992. *Pembangunan Sumber Daya Manusia*. PT Pustaka Jakarta.
- Sarjono Soekanto, 1998. *Aspek-Aspek Sosial Industry*. Bina Cipta Bandung.
- Shadily Hassan. 1984. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Bina Kasara Jakarta.
- Suryabrata Sumadi, 2005. *Metodologi penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sugionyo, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.
- suryabrata Umardi, 2010. *Metodologi Penelitian*. PT. Raya Grafindo Persada Jakarta.
- Soekanto Sokrjono 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers Jakarta.
- Siswato Joko 1988. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Cv Armico Bandung.
- Siagian H, 1985. *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Gunung Agung Jakarta.
- Suyono 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Penerbit Erlangga Ciracap Jakarta.
- Soelaeman Munandar, 2006. *Ilmu Sosial Dasar Teori Dan Konsep Ilmu Sosial*. PT Refika Aditama Bandung.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta; Bandung.
- Thoha Miftha 1995. *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Tindakan Prilaku*. PT Eraja Grarfindo Persada Jakarta.
- Purwadarhinta W.J.S, 1974. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta.
- Rahmat Djalaludin, 1994. *Piskologi Komunikasi Remaja*. Rosdakarya Bandung.
- Veger k.j. 1981. *Sosiologi pengetahuan*. Fisip UNSRAT Manado.
- Uphoffn.T dan W.F. Ilchman 1992. *The Political Economy Of Development*. Me Graw-Hin Book Compang inc New York.
- Sumber-Sumber Lain :*
- Undang-undang Dasar 1945.
 - Undang-Undang RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - Undang-Undang No. 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan.
 - Permendagri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa